

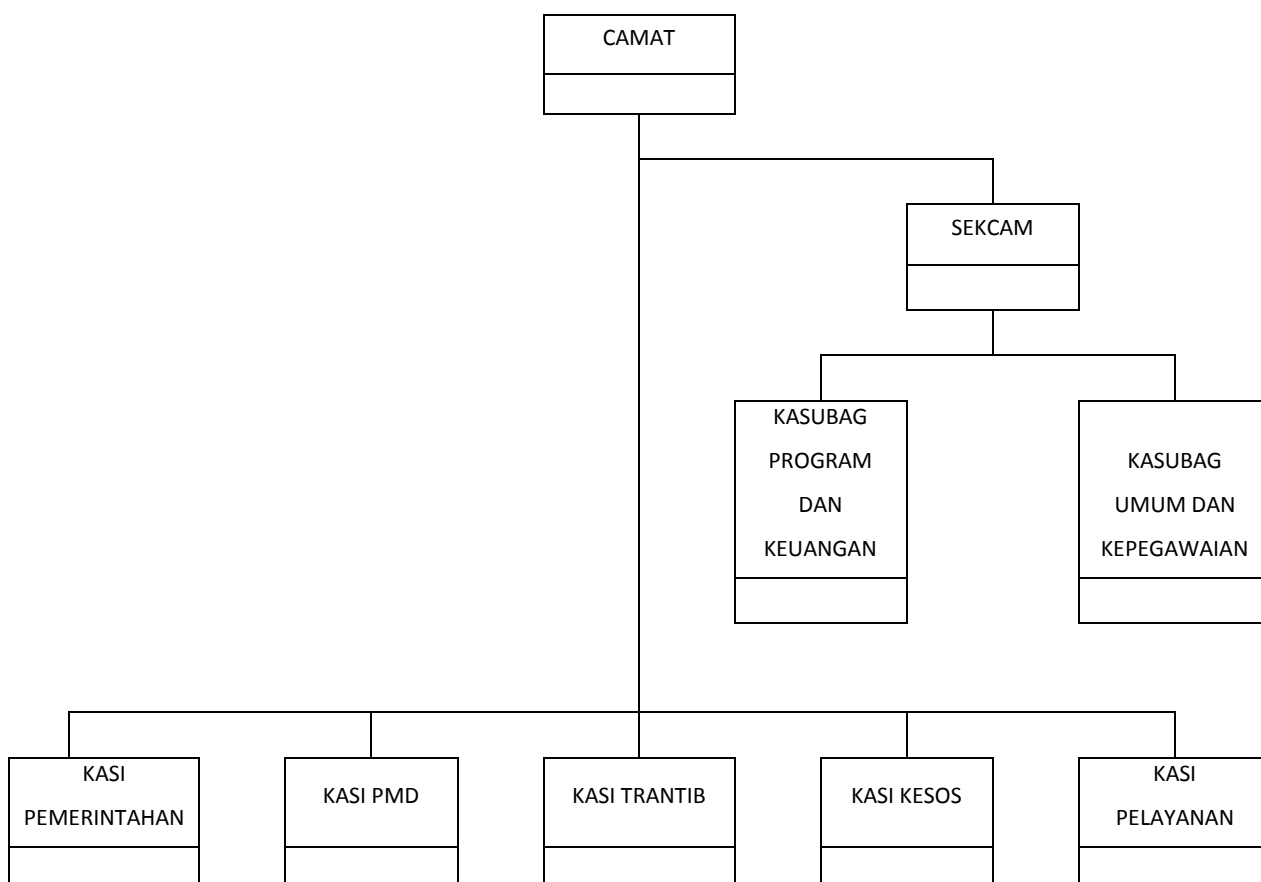
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Trangkil terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
	Penyelenggaraan	<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Trangkil berjumlah 18 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Trangkil	2		3	4	7	2	18	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1		1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	2		2	
	- Bendahara	-	-	-	-		1	1	
	- Staf PMD					1		1	
	- Pegawai Non PNS					3	1	4	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2017

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	-	-	5	4	-		5	4	1	1	10	8
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	-Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Bendahara								1				1
	- Staf PMD			1								1	
	- Pegawai Non PNS			1	1			2				3	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	5	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	6	unit	5 baik, 1	

				kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	5	unit	4 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	7	unit	4 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	24	unit	21 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	28	unit	24 baik, 4 kurang baik	
10	- AC	4	unit	baik	
11	- Almari	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	3	Unit	3 baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 3 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 5 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda

keuangan dan simda BMD (aset) maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 7 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 4 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 4 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 3 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filing cabinet di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 8 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 5 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filing cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

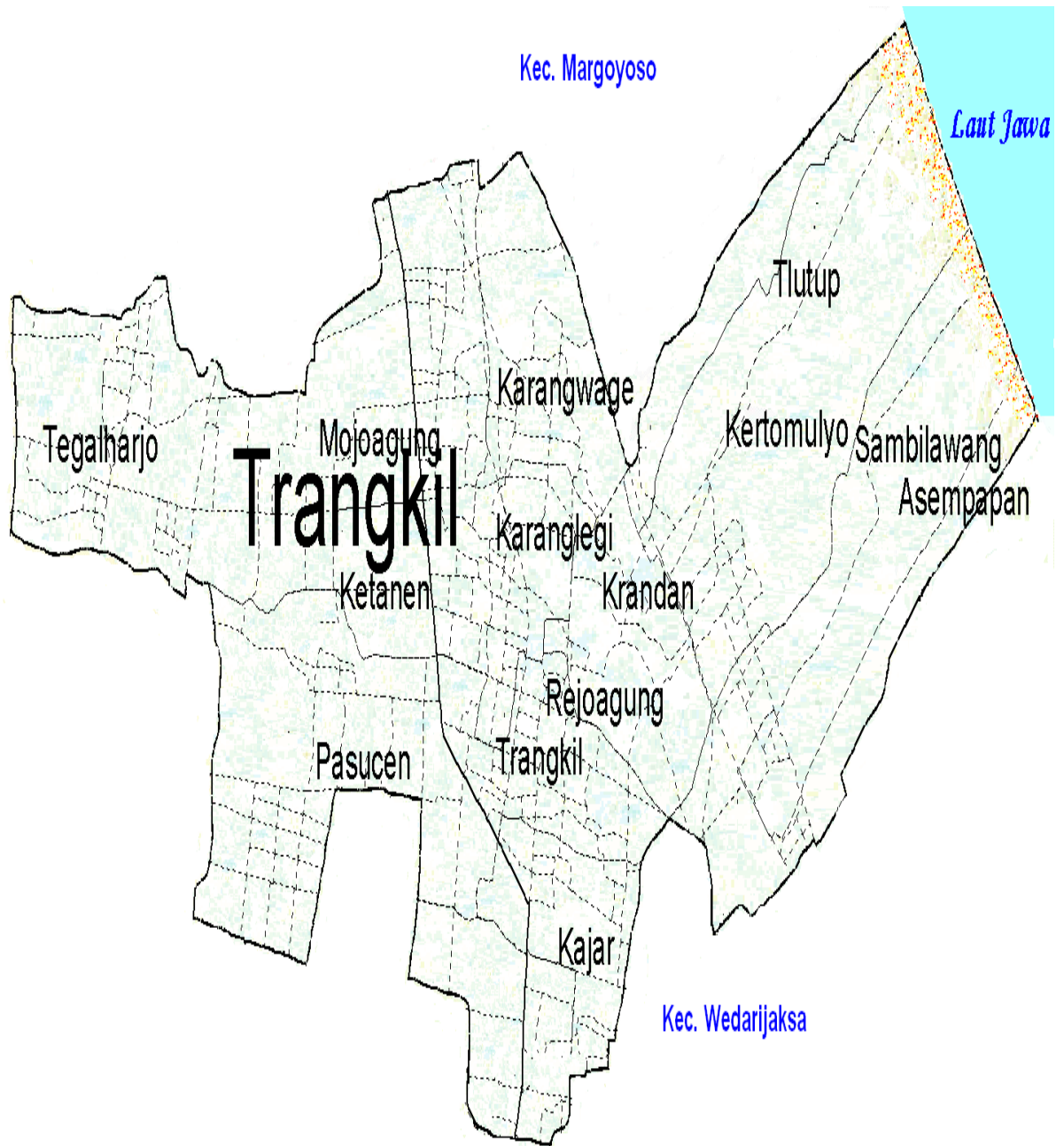
2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Trangkil

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Trangkil merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.283.90 Ha. Secara administrative Kecamatan Trangkil dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Laut Jawa
- Bagian Barat : Kecamatan Tlogowungu

PETA KECAMATAN TRANGKIL



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Trangkil dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Trangkil

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pasucen	670,83	58	8	
2	Ketanen	172,28	10	2	
3	Trangkil	273,00	51	8	
4	Kajar	153,65	24	5	
5	Asempapan	235,35	13	3	
6	Sambilawang	252,30	18	4	
7	Guyangan	135,69	13	2	
8	Kertomulyo	460,00	22	5	
9	Tlutup	244,75	10	2	
10	Kadilangu	260,54	10	2	
11	Krandan	48,05	6	2	
12	Rejoagung	140,10	21	3	
13	Karanglegi	149,72	25	3	
14	Karangwage	172,18	16	3	
15	Mojoagung	501,00	29	3	
16	Tegalharjo	414,46	48	5	

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Trangkil memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.548 jiwa, yang terdiri dari 30.088 jiwa laki-laki dan 31.460 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Trangkil tahun 2016 berjumlah 16.257 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Trangkil digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.7

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Trangkil

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	2.337	52.4	2.123	47,6	4.460	100
2	5-9	2.284	51.3	2166	48.7	4450	100
3	10-14	2.505	51.1	2399	48.9	4904	100
4	15-19	2.879	49.8	2901	50.2	5780	100

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
5	20-24	1.257	49.7	1.268	50.2	2.525	100
6	25-29	1.094	47.6	1.204	52.4	2.298	100
7.	30-34	1.246	46.5	1.434	53.5	2.680	100
8	35-39	1.529	46.8	1.740	53.2	3.269	100
9	40-44	1.707	47.8	1.864	52.2	3.571	100
10	45-49	1.719	48.2	1.850	51.8	3.569	100
11	50-54	1.582	50.3	1.563	49.7	3.145	100
12	55-59	1.345	51.2	1.242	48.8	2.587	100
13	60-64	982	49.3	1.008	50.7	1.990	100
14	65-69	773	48.1	834	51.9	1.607	100
15	70-74	594	46.3	690	53.7	1.284	100
16	75+	653	41.8	910	58.2	1.563	100

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Trangkil

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78%
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31%
3	SD/MI	9.618	9.923	19.541	33,94%
4	SMP/MTs	4.521	4.577	9.098	20,91%
5	SMA/SMK/MA	5.521	5.120	10.641	11,50%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	225	301	526	0,86%
8	S1	707	707	1.414	2,30%
9	S2	41	22	63	0,10%
10	S3	2	1	3	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut :

Tabel II.9

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.946	6.831	13.777	22,44%

2	Mengurus rumah tangga	8	7.554	7.562	12,32%
3	Pelajar/mahasiswa	5.175	4.213	9.388	15,29%
4	Pensiunan	146	45	191	0,31%
5	PNS	146	45	191	0,31%
6	TNI	21	1	22	0,04%
7	Polri	25	3	28	0,05%
8	Pedagang	25	3	28	0,05%
9	Petani/pekebun	2.939	1.853	4.792	7,80%
10	Peternak	32	6	38	0,06%
11	Nelayan	87	2	89	0,14%
12	Industri	41	42	83	0,14%
13	Konstruksi	12	1	13	0,02%
14	Transportasi	38	0	38	0,06%
15	Karyawan swasta	2.685	1.716	4.401	7,17%
16	Karyawan BUMN	30	12	42	0,07%
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,01%
18	Karyawan Honorer	46	34	80	0,13%
19	Buruh harian lepas	447	174	621	1,01%
20	Buruh tani	1.532	1.345	2.877	4,69%
21	Wiraswasta	54	4	58	0,09%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Trangkil

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	29.948	30.047	59.995	97,71%
2	Kristen	639	690	1.329	2,16%
3	Katolik	21	25	46	0,07%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	3	1	4	0,01%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	22	8	30	0,05%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Trangkil didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Trangkil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.11

Angka Kriminalitas di Kecamatan Trangkil

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	n/a	n/a	0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	n/a	n/a	0	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	n/a	n/a	0	0	0
4	Jumlah kasus penganiayaan	n/a	n/a	4	3	3

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
5	Jumlah kasus pencurian	n/a	n/a	17	15	13
6	Jumlah kasus penipuan	n/a	n/a	0	0	0
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	n/a	n/a	0	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	n/a	n/a	21	18	16
9	Jumlah penduduk	n/a	n/a	61.548	61.548	61.548
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	n/a	n/a	3,41	2,92	2.59

Sumber : Data Kepolisian Sektor Trangkil tahun 2017

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Trangkil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Data Poskamling di Kecamatan Trangkil

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Kajar	1	1	2
2	Trangkil	1	1	2
3	Karanglegi	4	4	8
4	Karangwage	4	4	8
5	Mojoagung	5	4	9
6	Ketanen	4	5	9
7	Pasucen	7	6	13
8	Tegalharjo	2	2	4
9	Krandan	3	2	5
10	Rejoagung	2	2	4
11	Kadilangu	2	3	5
12	Tlutup	10	5	15
13	Kertomulyo	7	4	10
14	Guyangan	5	0	5
15	Sambilawang	0	0	0
16	Asempapan	6	0	6
	Jumlah	63	43	106

1. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Trangkil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13
Data Anggota Linmas di Kecamatan Trangkil

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Kajar	26		26
2	Trangkil	54		54
3	Karanglegi	12		12
4	Karangwage	20		20
5	Mojoagung	30		30
6	Ketanen	10		10
7	Pasucen	10		10
8	Tegalharjo	35		35
9	Krandan	10		10
10	Rejoagung	10		10
11	Kadilangu	12		12
12	Tlutup	16		16
13	Kertomulyo	30		30
14	Guyangan	15		5
15	Sambilawang	13		3
16	Asempapan	18		18
	Jumlah	311		311

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Trangkil periode 2012 - 2017 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4,8		6,0	5,8	5,5	5,4	4,8	6,2	5,95	5,76	5,53	4,84	1,03	1,03	1,05	1,02	1,01
2	Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%		60		46	50	54	57	60	44	48	52	55	58	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		56		42	45	50	53	56	41	44	47	52	55	0.98	0.98	0.94	0.98	0.98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		45		25	30	35	40	45	22	26	30	35	40	0.88	0.87	0.86	0.88	0.89
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		94	96	98	100	100	93	94	95	98	100	0.99	0.98	0.97	0.98	1.00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		40		25	27	30	35	40	20	22	24	27	30	0.80	0.81	0.80	0.77	0.75
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		95	98	98	100	100	93	94	95	98	100	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		5		1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	-	0.50	0.67	0.75	0.80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		60		43	45	50	55	60	41	43	45	48	52	0.95	0.96	0.90	0.87	0.87
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		70		50	55	60	65	70	44	47	50	55	60	0.88	0.85	0.83	0.85	0.86
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		95	96	97	100	100	92	94	96	98	100	0.97	0.98	0.99	0.98	1.00
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	95	96	97	99	100	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		65		45	50	55	60	65	38	40	42	46	50	0.84	0.80	0.76	0.77	0.77
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		95		82	83	85	90	95	78	80	82	83	88	0.95	0.96	0.96	0.92	0.93

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Trangkil sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013,2014,2015,2016 dan 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Trangkil sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.16

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	55,000	49,000	61,000	43,000	24,500	52,440	45,600	56,000	39,000	21,840	-43.02	#VALUE!	-2.09	-1.24	1.49	1.66	-3.83
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11,400	11,800	15,200	-	7,450	9,660	9,660	13,176	-	5,380	#DIV/0!	#VALUE!	10.37	-3.47	#DIV/0!	8.07	-100.00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	20,000	25,600	-	-	-	18,000	24,000	9.33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	24,000	25,500	14,700	11,500	-	20,000	20,000	11,530	8,790	-5.44	#DIV/0!	#DIV/0!	-6.78	0.56	#DIV/0!	-12.86
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	9,600	9,800	14,500	14,000	15,300	7,200	7,200	12,250	11,030	12,145	1.86	#VALUE!	33.67	-0.21	-2.93	14.21	11.25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	13,500	17,800	13,000	18,700	-	11,036	15,000	10,400	16,757	7.31	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.96	-2.27	#DIV/0!	-1.47
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan	-	51,000	18,000	1,800	30,000	-	47,500	15,000	880	28,301	223.81	#DIV/0!	#DIV/0!	1.45	-34.62	#DIV/0!	-63.11

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Publik																	
Program Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,000	113,000	142,000	192,000	210,000	83,926	107,907	139,664	171,982	195,512	9.38	#VALUE!	1.09	0.90	0.39	13.58	12.36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	52,000	74,000	110,000	72,000	113,000	48,263	70,650	104,660	61,660	102,223	28.47	#VALUE!	1.14	-0.84	-1.90	21.35	-3.35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,400	11,000	13,000	14,000	10,400	5,580	7,920	8,750	10,000	8,000	-8.57	#VALUE!	0.34	0.79	-2.60	11.90	6.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8,000		15,600	11,000	10,600	6,500		13,200	8,385	8,040	-0.91	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.14	19.38	#DIV/0!
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,000	1,600	1,700			4,000	1,080	1,392	1.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.39	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trangkil

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Trangkil merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Trangkil kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas).

Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.